



PARADOKS BERAS DI RAK TOKO: **KOSONG**

Stok beras pemerintah mencapai sekitar 4,7 juta ton dan berulang kali memastikan pasokan aman. Namun, faktanya saat ini beras premium sulit ditemukan di sejumlah ritel modern. Bahkan di beberapa toko, rak makanan pokok rakyat Indonesia itu kosong. Ironisnya lagi, harga beras bertahan mahal. Data Kementerian Dalam Negeri menyebut masih terdapat 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Berdasarkan operasi Bapanas dikutip Senin (21/9/2026), ada beras fortifikasi (beras putih biasa yang dicampur dengan butiran kernel khusus dengan tambahan vitamin dan mineral esensial, Red), yang dijual hingga Rp57.000 per kilogram. Padahal semestinya dibanderol sekitar Rp13.500 per kilogram. Sementara data BPS, secara nasional harga beras medium meningkat 0,76 persen pada minggu ketiga September 2026. Beras dijual Rp14.644 per kilogram. Padahal harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan untuk zona 1 Rp13.500 per kilogram, zona 2 Rp14.000, dan zona 3 Rp15.500. Sementara harga rata-rata nasional beras premium naik 0,69 persen dikisaran Rp16.495 per kilogram. Diketahui HET zona 1 yang ditetapkan Rp14.900 per kilogram, zona 2 Rp15.400 dan zona 3 Rp15.800. Untuk mengatasinya, pemerintah berjanji menyiapkan operasi pasar untuk mencegah harga semakin menggila. Bantuan pangan juga akan disalurkan kepada 34,4 juta orang di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah menyediakan 1 juta ton beras SPHP. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun optimistis harga beras akan turun dalam sepekan ini. Semoga. **BACA HAL 11...**

PROVINSI DENGAN HARGA BERAS PREMIUM TERTINGGI PER 21/9/2026

Kalimantan Tengah
Rp 25.400
Sumber: BI

DKI Jakarta
Rp 21.350
.....
Papua
Rp 21.100

Maluku Utara
Rp 19.750
.....
Kalimantan Selatan
Rp 19.700

Maluku
Rp 19.350
.....
Sumatera Barat
Rp 19.200

HARGA BERAS: MASIH NAIK

Beras medium

Harga rata-rata nasional

RP 14.644/KG

Naik 0,76% pada minggu ketiga
September 2026

HET

Zona 1: **Rp13.500/kg**

Zona 2: **Rp14.000/kg**

Zona 3: **Rp15.500/kg**

Beras premium

Harga rata-rata nasional

RP 16.495/KG

Naik 0,69%

HET

Zona 1: **Rp14.900/kg**

Zona 2: **Rp15.400/kg**

Zona 3: **Rp15.800/kg**



SETELAH 2 KALI ABSEN, NUSRON MUNCUL DI DPR

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya kembali hadir secara langsung di DPR, Senin (21/9/2026). Kehadiran itu terjadi setelah dua kali berturut-turut ia absen dari agenda bersama DPR pada pekan sebelumnya, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan ATR/BPN.



Nusron Wahid hadir dalam rapat Baleg DPR RI membahas RUU Pengaturan Reforma Agraria pada Senin (21/9/2026). Ist

Nusron datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk mengikuti rapat Panitia Kerja (Panja) dan pleno Badan Legislati (Baleg) DPR bersama pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria.

Menurut laporan, rapat Panja dibuka Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sekitar pukul 11.05 WIB. Nusron menyusul masuk ke ruang rapat sekitar pukul 11.23 WIB.

Dasco bahkan menyambut kehadiran Nusron sebelum pembahasan memasuki agenda pendapat akhir mini dari masing-masing fraksi.

"...kami ucapkan selamat datang kepada Menteri ATR/BPN yang sudah hadir pada hari ini," kata Dasco dalam rapat tersebut.

Kehadiran Nusron menjadi perhatian karena pada Selasa (15/9) dan Rabu (16/9), ia tidak menghadiri agenda DPR. Dalam dua kesempatan itu, Kementerian ATR/BPN diwakili Wakil Menteri ATR/BPN Ossi Dermawan.

Ossi sebelumnya menjelaskan Nusron tidak hadir karena memiliki penugasan dan kegiatan lain yang telah terjadwal. Ia juga memastikan Nusron tidak sedang sakit dan tetap berkomunikasi dengan jajaran

kementerian.

Kali ini Nusron datang ketika pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat I. Baleg kemudian menyepakati RUU tersebut untuk diteruskan ke pembicaraan tingkat II di rapat paripurna DPR. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap kelanjutan pembahasan RUU tersebut.

Bagi Nusron, RUU tersebut merupakan landasan hukum yang telah lama ditunggu untuk menangani persoalan pertanahan.

"Reforma Agraria merupakan bagian penting dari upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kemakmuran rakyat," kata Nusron.

Ia juga mengatakan keberadaan aturan baru diharapkan mempercepat penyelesaian konflik agraria.

"Dengan adanya formula ini (RUU tentang Reforma Agraria) akan ada formula penyelesaian lebih cepat," ujarnya.

Soal pengunduran dirinya dari Golkar, Nusron memberikan keterangan berbeda. Seusai rapat DPR, ia mengatakan pembicaraan mengenai statusnya di kepengurusan Golkar telah dilakukan bersama Bahlil sejak 2025.

"Jadi selebihnya lebih baik

tanyakan sama Pak Bahlil selaku ketua umum. Kami sudah pernah diskusi masalah itu lama," ujar Nusron. Ia tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya.

Kesal Dicecar Kasus Suap

Dalam kesempatan itu, Nusron dicecar wartawan mengenai evaluasi internal ATR/BPN setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Alih-alih menjawab panjang, Nusron menunjukkan kekesalannya. Ia meminta awak media memberi jalan karena hendak meninggalkan lokasi.

"Ini kan aku mau pulang. Caranya enggak begini, caranya enggak begini," kata Nusron, Senin (21/9/2026).

Nusron kemudian menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK.

"Kan sudah tak sampaikan kalau soal itu, kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi posisi kami menghormati dan mengikuti proses yang ada," ujarnya.

Kasus yang membayangi Nusron bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 14 September 2026 di wilayah Jabodetabek. KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

DAFTAR 8 TERSANGKA KASUS KORUPSI ATR/BPN

ORANG KEPERCAYAAN NUSRON WAHID



Arif Sugiyanto
(ARF / Gus Arif)

Pihak swasta, mantan Bupati Kebumen, diduga salah satu orang kepercayaan utama Menteri ATR/BPN.



Fahd El Fouz / Fahd A. Rafiq (FEZ)

Pihak swasta, politikus, diduga orang kepercayaan menteri.



Erwin (ERW)

Pihak swasta, diduga penghubung atau orang kepercayaan menteri.



Muhammad Fakhry (MF)

Perantara lapangan. Bersama Erwin diduga menyertakan uang kepada Arif.

TERSANGKA LAIN



Lampri (LMP)

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.



Sontang Coin Manurung (SON)

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I.



Adrianto Pitojo Adhi (ADR)

Direktur Utama / Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.



Rizal Pahlevi (LEV)

Pihak swasta / perantara dari pihak Summarecon.

BARANG BUKTI UANG

Rp31,86 miliar + US\$2,615 juta + SGD1,9745 juta + SAR910 + RM981
ditemukan di rumah Arif di Cibubur.

Mereka ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi; serta lima pihak swasta, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Empat nama terakhir yang disebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut KPK sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan atau representasi Nusron. KPK menyatakan penyebutan itu didasarkan pada hasil penyelidikan dan bukti yang diperoleh penyidik. KPK juga menyita uang sekitar Rp106,3 miliar dalam perkara tersebut. (gus,ist,kcm/dya)

Wacana Minimal Dua Fraksi DPR Usung Capres Memicu Polemik **GERAKAN RAKYAT: AKAL-AKALAN POLITIK**

Wacana mengubah mekanisme pencalonan presiden dengan mensyaratkan dukungan minimal dua partai politik atau dua fraksi DPR memicu perdebatan. Usulan itu muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Sahrin Hamid menilai ketentuan minimal dua partai atau dua fraksi justru berpotensi menghidupkan kembali pembatasan pencalonan yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.

"Sebagai warga negara, terlebih bagi mereka yang mendapatkan mandat sebagai wakil rakyat di parlemen dan memiliki kewenangan membentuk undang-undang, sudah menjadi kewajiban konstitusional untuk menghormati, menaati, dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi," kata Sahrin kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menilai rezim presidential threshold, berapa pun persentasenya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Sahrin menilai konsekuensi putusan tersebut adalah seluruh partai politik peserta pemilu memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon. Menurut dia, hak tersebut tidak dapat kembali dibatasi berdasarkan jumlah partai atau fraksi tertentu.

"Artinya, satu partai politik peserta pemilu memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak harus dua partai, tiga partai, atau sejumlah partai tertentu," ujarnya.

Ia kemudian menyoroti munculnya wacana agar pencalonan presiden minimal mendapat dukungan dua partai parlemen atau dua fraksi.

"Karena itu, apabila DPR kemudian mewacanakan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan sekurang-kurangnya oleh dua partai parlemen atau 2 fraksi, bagi kami ini adalah akal-akalan politik untuk menghidupkan kembali pembatasan yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Ini adalah pembangkangan terhadap konstitusi," kata Sahrin.



(Ilustrasi) Di bagian bawah surat suara pemilihan presiden (pilpres) 2024 dicantumkan partai pendukung paslon. (Dok)

Sahrin juga mengaitkan polemik tersebut dengan kepercayaan publik terhadap konstitusi.

"Ini bukan lagi arogansi kekuasaan. Apabila konstitusi dengan sengaja disiasati untuk akal-akalan kepentingan politik elite, maka itu merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi sekaligus pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat," ujarnya.

Parpol Berbeda Pandangan

Wacana dua partai atau dua fraksi tersebut pertama kali mengemuka setelah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan mendengar adanya masukan agar mekanisme pencalonan presiden mensyaratkan dukungan sedikitnya dua fraksi.

"Saya mendengar ada masukan yang jelas bahwasanya pergantiannya model daripada dukungan pada presiden itu adalah berdasarkan dukungan sedikit-dikitnya dua fraksi," kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Paloh menyatakan usulan itu layak dipertimbangkan. Menurut dia, apabila ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ditetapkan tinggi, dukungan minimal dua fraksi tetap merepresentasikan jumlah suara yang besar.

Pandangan serupa datang dari Partai Amanat Nasional (PAN). Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan partainya setuju jika pasangan calon presiden dan wakil presiden minimal diusulkan dua partai politik peserta pemilu.

Viva berpendapat ketentuan tersebut tidak otomatis bertentangan dengan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Ia menyebut aturan minimal dua partai dapat menjadi bagian dari open legal policy

pembentuk undang-undang, selama tidak menggunakan persentase kursi DPR atau suara nasional sebagai ambang batas.

"Dengan demikian di Pemilu 2029 sudah tidak ada lagi ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden," kata Viva.

Ia juga mengingatkan gabungan partai tidak boleh menciptakan dominasi yang membatasi jumlah pasangan calon maupun pilihan memilih.

Sementara itu, PDI Perjuangan mengusulkan agar mekanisme tersebut tidak berhenti pada batas minimal. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan partainya masih mencermati gagasan yang berkembang, termasuk soal apakah syarat dua partai berlaku bagi partai parlemen atau seluruh peserta pemilu.

"Kalau presidential threshold pendekatannya adalah partai politik, barangkali kami setuju," kata Said.

Said mengusulkan adanya batas maksimal jumlah partai yang dapat bergabung mengusung satu pasangan calon. Ia mencontohkan minimal dua dan maksimal empat partai.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus juga menyampaikan gagasan serupa. Ia menilai syarat minimal dua partai tanpa batas atas masih dapat menghasilkan hanya dua pasangan calon.

"Agar pilpres bisa menghasilkan lebih dari dua pasangan calon, maka perlu diatur batas atas gabungan partai politik, misalnya maksimal 25 persen kursi DPR atau 30 persen suara sah," kata Deddy.

Menurut Deddy, tanpa batas atas, enam partai dapat bergabung mengusung satu pasangan dan dua partai lainnya mengusung pasangan lain. Partai nonparlemen kemudian

SIMULASI MEMAKAI KONFIGURASI PILPRES 2024

Perolehan Suara

	Prabowo-Gibran 96.214.691 suara
	Anies-Muhaimin 40.971.906 suara
	Ganjar-Mahfud: 27.040.878 suara

Total suara sah
164.227.475. (KPU)

Koalisi politiknya pada 2024

Catatan: PPP yang menjadi salah satu partai pendukung Ganjar tidak memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2024.

Jadi, jika aturan minimal dua fraksi diterapkan dengan basis hasil DPR 2024, koalisi Ganjar-Mahfud tidak memenuhi syarat dua fraksi DPR

berpotensi harus masuk ke salah satu kubu. Berbeda dengan partai yang menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut, PKS menekankan agar perubahan aturan tetap mengacu pada putusan MK.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat. Menurut dia, hasil putusan tersebut harus dituangkan dalam revisi UU Pemilu.

"Keputusan MK tegas dan jelas. Sifatnya final dan mengikat," kata Mardani, Senin (21/9/2026).

Ia mengatakan DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Namun, norma alternatif yang dibuat dalam revisi UU Pemilu tidak boleh bertentangan dengan putusan MK. (wid,kum,dtc/dya)

MEDIA ASING SOROTI KARHUTLA RI: API MASIH SULIT DIPADAMKAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi sorotan media asing. Bukan hanya karena luas kebakaran yang membesar, tetapi juga karena pemerintah telah mengerahkan puluhan pesawat dan puluhan ribu personel, sementara api masih sulit dikendalikan.



Pemandangan drone menunjukkan Katedral Santo Yusuf diselubungi kabut akibat kebakaran hutan, di Pontianak, provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 15 September 2026. (Rtrist)

AFP pada Senin (21/9/2026) mengangkat laporan berjudul 'Indonesia doing 'everything' but struggling to curb fires'. Kantor berita Prancis itu menyoroti penggerakan 64 pesawat dan 54.000 personel untuk menangani kebakaran di Sumatera dan Kalimantan sejak bulan lalu.

Namun, besarnya kekuatan yang dikerahkan belum membuat kebakaran mudah dipadamkan. AFP mencatat petugas telah berjuang selama berminggu-minggu menghadapi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera yang menghasilkan kabut asap hingga menyelimuti sebagian Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan seluruh kekuatan pemerintah terus bergerak dari udara hingga darat.

"Dari udara hingga darat, seluruh kekuatan terus bergerak. Semuanya dilakukan untuk memadamkan api, mengurangi dampak asap, dan yang paling penting melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran hutan dan lahan," kata Teddy, seperti dikutip AFP Srin (21/9/2026).

Masalahnya, karakter wilayah yang terbakar membuat operasi pemadaman tidak sederhana. Luas wilayah yang terdampak dan kondisi lahan gambut menjadi kendala serius. Api dapat membakar lapisan gambut di bawah permukaan sehingga titik api

tidak selalu mudah terlihat dan dipadamkan dari udara.

Juru bicara BPBD Kalimantan Barat Daniel Sinyor mengatakan kedalaman api di lapisan gambut menjadi salah satu persoalan. Ketersediaan air untuk pemadaman dari darat juga semakin terbatas.

"Secara umum, sumber air berkurang atau bahkan menghilang di daerah yang terdampak kebakaran," ujar Daniel.

Asap Terus Bergerak

Sorotan media asing juga muncul karena asap karhutla telah bergerak melintasi batas negara.

Reuters melaporkan kebakaran Indonesia tahun ini sebagai yang terburuk dalam 11 tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk fenomena super El Nino, kekeringan dan tingginya temperatur. Asap kemudian memengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia dan Singapura.

Di Singapura, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori tidak sehat di seluruh wilayah pada 15 September. Reuters mencatat kondisi tersebut menjadi kejadian pertama sejak Oktober 2023 ketika indeks kualitas udara Singapura mencapai kategori tidak sehat secara menyeluruh.

CNA sebelumnya juga melaporkan asap dari kebakaran di Kalimantan dan Sumatera telah menyebar ke Malaysia, Brunei, bahkan Filipina. Sejumlah

wilayah di Sarawak, Malaysia, mengalami lonjakan kualitas udara hingga level berbahaya.

Persoalan itu membuat karhutla Indonesia berubah menjadi isu regional. Malaysia tidak hanya memantau dampak asap, tetapi ikut menawarkan bantuan untuk operasi pemadaman.

Pada Jumat (18/9), Presiden Prabowo Subianto menyatakan Malaysia menawarkan bantuan berupa tiga helikopter, satu pesawat, dan 52 personel untuk menangani kebakaran di Kalimantan.

"Malaysia telah menawarkan bantuan untuk membantu kami menangani kebakaran hutan di Kalimantan. Saya menyambutnya dengan rasa terima kasih dan gembira," kata Prabowo, seperti dikutip Reuters.

Jepang juga memberikan

LIMA PERUSAHAAN YANG IZINNYA BARU DICABUT

- PT Wana Lestari Jaya
konsesi sekitar 29.000 hektare,
area terbakar 47 hektare.
- PT Prima Multi Buana
konsesi 11.882 hektare,
area terbakar 18,20 hektare.
- PT Pancaran Wana Nusa
konsesi 3.812 hektare,
area terbakar 497 hektare.
- PT Grash Putri Perdana
konsesi 24.990 hektare,
area terbakar 374,99 hektare.
- PT Bagus Wahana Lestari
konsesi 18.640 hektare,
area terbakar 231,10 hektare

dukungan. Sekitar 350 anggota Pasukan Bela Diri Jepang telah tiba di Kalimantan Barat pada September untuk membantu operasi penanganan kebakaran.

Dampaknya bukan semata soal luas lahan yang terbakar. Reuters melaporkan lebih dari 12,5 juta orang di tujuh provinsi telah terpapar kabut asap berbahaya. Kasus gangguan pernapasan juga melonjak dari 50.891 menjadi 113.336 kasus dalam waktu lebih dari sepekan.

The Guardian pada 21 September juga menyoroti dampak kesehatan dan lingkungan dari kebakaran tersebut. Media Inggris itu melaporkan luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 895.000 hektare, dengan asap menyebar ke Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina.

Pemerintah sendiri mencatat lebih dari 202.000 hektare lahan terbakar sepanjang Januari-Juli 2026. Sementara estimasi Nusantara Atlas menempatkan angka kebakaran pada periode tersebut hampir 300.000 hektare. Jika kondisi Agustus ikut diperhitungkan, luas wilayah terdampak diperkirakan mendekati 896.000 hektare. (tin,ist,kum/dya)

Umat Islam berdoa usai melaksanakan Shalat Istisqa di pelataran Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalimantan Barat bulan lalu. (dok.ant)



TUNTUTAN PIDANA

JPU KPK menuntut Sudewo dengan:

- Penjara 8 tahun 6 bulan
- Uang pengganti Rp3,6 miliar, atau 3 tahun penjara jika tidak dibayar
- Pencabutan hak dipilih selama 5 tahun setelah menjalani hukuman

DUDUK PERKARA

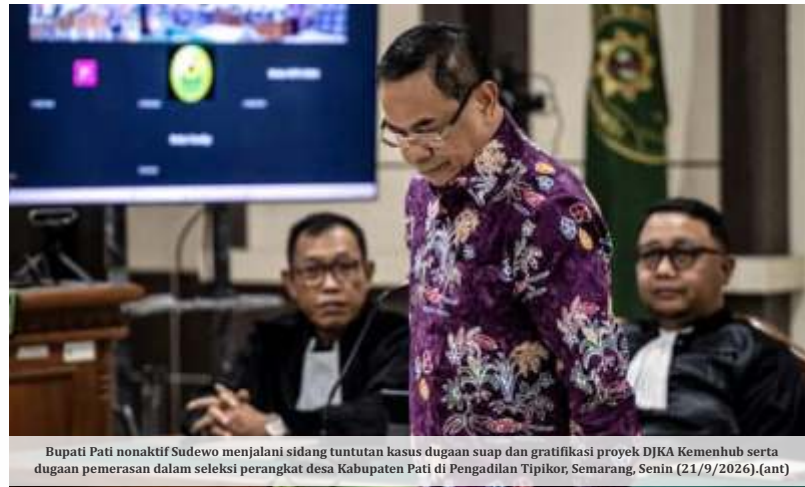
Sudewo didakwa dalam dua perkara korupsi:

- Suap proyek DJKA terkait proyek jalur kereta api.
- Jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Sudewo ditangkap melalui OTT KPK pada 20 Januari 2026.

MASSA SEMPAT RICUH, SUDEWO DITUNTUT 8,5 TAHUN

Massa pendukung dan kelompok yang menentang Bupati Pati nonaktif Sudewo sempat terlibat keributan di sekitar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (21/9/2026). Pada hari yang sama, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sudewo 8 tahun 6 bulan penjara.



Tuntutan itu dibacakan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan serta dugaan pemerasan dalam seleksi perangkat desa Kabupaten Pati. Selain pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim mencabut hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. Masa pencabutan hak politik itu dihitung sejak Sudewo selesai menjalani pidana pokok.

"Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ujar jaksa KPK Greafik Loserte di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (21/9/2026).

Jaksa juga menuntut Sudewo membayar denda Rp300 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, jaksa meminta diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.

Selain itu, Sudewo dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp3,6 miliar. "Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 tahun," tegas jaksa.

Dalam perkara DJKA, jaksa menilai Sudewo terbukti menerima suap sebagaimana Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ia juga dinilai terbukti menerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor.

Menurut jaksa, Sudewo menerima uang dari kontraktor

pelaksana proyek perkeretaapian di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penerimaan itu disebut berkaitan dengan upaya mengamankan jatah proyek bagi rekanan tertentu.

Total penerimaan suap dan gratifikasi yang dikaitkan dengan Sudewo mencapai sekitar Rp3,8 miliar.

Nilai tersebut tidak hanya berupa uang. Jaksa menyebut terdapat pemberian berupa sebilah keris serta fasilitas pengaspalan jalan pribadi dengan nilai sekitar Rp150 juta.

Dalam tuntutanannya, jaksa menyatakan unsur menerima hadiah telah terpenuhi.

"Unsur menerima hadiah sudah terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa.

Perkara kedua berkaitan dengan proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Pati.

Jaksa menyatakan Sudewo bersama Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis Sumarjiono, dan Kepala Desa Sukorukun Karjan terbukti melakukan pemerasan terhadap calon perangkat desa.

Perbuatan tersebut dinilai memenuhi Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

Dalam praktiknya, para calon perangkat desa diminta menyetorkan uang dengan besaran antara Rp165 juta hingga Rp255 juta. Besaran setoran disebut disesuaikan dengan jabatan yang hendak diisi.

Sudewo dan pihak-pihak lain disebut memperoleh uang sebesar Rp2,49 miliar.

Jaksa menilai rangkaian penerimaan tersebut telah

memenuhi unsur pidana yang didakwakan kepada Sudewo.

Keributan terjadi setelah massa tidak terima Sudewo, yang tersandung dua kasus korupsi, dituntut pidana 8 tahun penjara oleh jaksa KPK.

Massa memaki-maki jaksa dengan kata-kata kasar, merusak pagar pembatas di ruang sidang, hingga berupaya menyerang jaksa.

Beruntung, sejumlah polisi berhasil membawa tiga jaksa KPK keluar dari ruang sidang dengan aman.

"Jaksa KPK gadungan. Jaksa anj*ng," teriak sejumlah pendukung Sudewo.

Situasi di halaman Pengadilan Tipikor juga memanas. Massa terus memprovokasi untuk menyerang jaksa dan melontarkan makian kepada KPK.

Sudewo sempat menemui para pendukungnya untuk meminta dukungan sebelum meninggalkan Pengadilan Tipikor menggunakan mobil tahanan.

Tak Mengakui Perbuatan

Dalam tuntutanannya, JPU juga menyampaikan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan.

Jaksa menilai Sudewo tidak mengakui perbuatannya. Selain itu, perbuatannya disebut telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPR RI dan pemerintah daerah tingkat kabupaten.

Sementara faktor yang meringankan adalah Sudewo belum pernah dihukum.

"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," kata jaksa.

Tuntutan tersebut belum merupakan putusan pengadilan. Setelah JPU membacakan tuntutan, Sudewo masih memiliki kesempatan menyampaikan pembelaan atau pleidoi sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Di luar ruang sidang, suasana juga memanas. Massa pendukung Sudewo berhadapan dengan kelompok Pati Ora Sepele (POS), yang datang untuk menyampaikan aspirasi terkait perkara yang menjerat mantan anggota DPR RI tersebut.

Keributan terjadi setelah tiga bus yang membawa massa kontra Sudewo tiba di sekitar pengadilan. Massa pendukung yang lebih dahulu berada di lokasi mendatangi bus dan meminta rombongan tersebut meninggalkan kawasan pengadilan.

Situasi berkembang menjadi saling dorong dan bentrokan. Polisi kemudian memisahkan kedua kelompok.

Pengamanan diperketat untuk mengantisipasi gesekan. Sebanyak 548 personel gabungan dikerahkan di sekitar Pengadilan Tipikor Semarang.

Ketegangan kembali terjadi setelah tuntutan dibacakan. Massa pendukung Sudewo yang berada di dalam pengadilan menolak tuntutan jaksa dan sempat berusaha mendekati tim JPU KPK.

Polisi kemudian mengevakuasi jaksa ke tempat yang lebih aman. Massa juga sempat berupaya menghadang mobil tahanan yang membawa Sudewo kembali ke rumah tahanan.

Aparat membuat barikade hingga kendaraan yang membawa Sudewo dapat meninggalkan kompleks pengadilan.

KPK meminta seluruh pihak menghormati proses persidangan dan tidak mengganggu jalannya proses hukum.

Sudewo sendiri tetap menjalani penahanan selama proses hukum berlangsung. Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2026 terkait dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Pati. (ton,ist/dya)

DPRD Kota Malang Menyoal Pengangguran Terbuka saat Anggaran Mengecil

MALANG- Plafon anggaran Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang dalam KUA-PPAS APBD 2027 turun menjadi Rp19,94 miliar. Angka ini lebih kecil dari 2026 yang sebesar Rp20,36 miliar. DPRD pun memberi sorotan karena terjadi di tengah upaya pemerintah menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Namun, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyebut angka tersebut belum final dan membuka peluang penambahan anggaran saat pembahasan RAPBD 2027.

"Ini kan masih KUA-PPAS 2027. Nanti pada saat RAPBD, kami akan hitung ulang," ujar Wahyu, ditemui usai Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Kantor DPRD Kota Malang, Senin (21/9/2026).

Dijelaskannya, penyusunan anggaran pada tahap KUA-PPAS saat ini belum sepenuhnya memperhitungkan pembiayaan atau sumber anggaran yang nantinya akan diperoleh Pemkot Malang.

Wahyu memastikan, pemerintah akan mengarahkan anggaran kepada

perangkat daerah yang dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, prioritas nasional, visi-misi kepala daerah, serta target dalam RPJMD. "Memang skemanya nanti kami akan berikan kepada perangkat daerah yang sejalan dengan prioritas pembangunan, prioritas nasional, visi-misi, termasuk juga dalam RPJMD," katanya.

Di sisi lain, Pemkot Malang memasang target TPT sebesar 5,6 persen pada 2027. Wahyu mengatakan target tersebut disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi ketenagakerjaan di Kota Malang.

Ia menjelaskan, terdapat karakteristik pekerja di Kota Malang yang menurutnya perlu menjadi pertimbangan dalam melihat angka ketenagakerjaan. Salah satunya, yakni banyaknya pekerja industri kreatif seperti konten kreator yang masuk dalam kategori pekerja informal.

Selain itu, Kota Malang juga memiliki jumlah mahasiswa yang cukup besar. Kondisi tersebut, menurut Wahyu, turut memengaruhi pembacaan data ketenagakerjaan di daerah.

Wahyu menilai kondisi tersebut

perlu diperhitungkan ketika pemerintah menetapkan target penurunan TPT. Karena itu, Pemkot Malang tidak semata-mata menggunakan angka target nasional sebagai patokan. "Kami memasang target sesuai dengan potensi ataupun permasalahan yang ada di Kota Malang," katanya.

Ia menambahkan, target tersebut telah disepakati dalam RPJMD untuk periode 5 tahun. Dengan demikian, target TPT yang dibahas untuk 2027 merupakan bagian dari target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut. "Nanti perkara bisa melampaui target pusat, tentu akan mempertimbangkan potensi dan masalah yang kami miliki," tuturnya.

Diketahui, berdasarkan dokumen KUA-PPAS 2027, plafon anggaran Disnaker-PMPTSP turun dari sekitar Rp20,36 miliar pada 2026 menjadi

Rp19,94 miliar pada 2027. Selisihnya mencapai sekitar Rp420 juta.

Kondisi tersebut sebelumnya menjadi sorotan Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang. Juru bicara Fraksi NasDem-PSI, Suyadi, mempertanyakan keseriusan Pemkot Malang dalam menangani persoalan pengangguran terbuka yang masih menjadi salah satu tantangan pembangunan daerah. (Santi/Dya)



Resmi! Jajanan Ladu Kota Batu Raih Status Warisan Budaya Takbenda



BATU- Ladu, jajanan tradisional Kota Batu, kini mendapat pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu pun tak ingin status tersebut berhenti sebagai sebuah sertifikat. Hotel dan berbagai event pariwisata dibidik menjadi etalase untuk membawa ladu lebih dekat

kepada wisatawan.

"Kebetulan di tahun 2026 ini salah satu makanan khas Kota Batu, yakni jajanan ladu mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda (WBTB) dari Kementerian Kebudayaan. Momennya pas dengan upaya kami mendeklarasikan diri sebagai kota kreatif dunia bidang gastronomi," ujar Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu, Ony Ardianto, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, jajanan ladu memang dikenal di sejumlah daerah. Namun, Kota Batu menjadi daerah pengusul karena penggiat, maestro, serta pengrajin ladu yang masih aktif mempertahankan tradisi pembuatannya berada di Kota Batu. Produksi ladu juga masih berlangsung hingga saat ini.

Ony menjelaskan, ladu merupakan

jajanan tradisional yang terbuat dari beras ketan putih. Di Kota Batu, salah satu sentra pembuatan ladu berada di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumijahi.

Proses pembuatannya masih mempertahankan cara tradisional. Tepung beras ketan dimasak dan ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula. Adonan yang telah halus selanjutnya dijemur sebelum dioven hingga mengembang dan menghasilkan tekstur menyerupai kerupuk.

Dikatakannya, status WBTB tidak mengharuskan sebuah budaya hanya terdapat atau berasal secara eksklusif dari satu daerah. Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada sejumlah kesenian yang diusulkan melalui Kota Batu meskipun memiliki akar budaya yang lebih luas.

Ony menuturkan, proses pengusulan ladu sebagai WBTB telah melalui tahapan di tingkat provinsi hingga akhirnya dinyatakan lolos.

Setelah sertifikat WBTB diterima, Pemkot Batu berencana mendorong

ladu untuk semakin dikenal melalui sektor akomodasi dan berbagai kegiatan pariwisata. Ony mengatakan, pihaknya akan menganjurkan hotel maupun penyelenggara kegiatan untuk menyajikan ladu sebagai salah satu jajanan khas Kota Batu.

"Di setiap event, setiap hotel akan kami anjurkan penyelenggara ataupun pemilik akomodasi untuk bisa menyajikan sebagai jajanan khas kita," katanya. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Batu untuk memperkenalkan kekayaan lokal kepada wisatawan melalui sektor pariwisata.

Selain kuliner, produk kriya dan kesenian lokal juga mulai diarahkan untuk mendapat ruang di hotel-hotel. Menurut Ony, sejauh ini produk kriya dan jajanan oleh-oleh khas Kota Batu telah menjadi bagian yang ditampilkan di sejumlah akomodasi. Pelaku seni budaya juga mulai difasilitasi untuk tampil di hotel, termasuk melalui pertunjukan tari. (Santi/Dya)

Ratusan pemukim Israel melakukan ritual keagamaan di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Minggu (20/9/2026). (ist)



RATUSAN PEMUKIM ISRAEL MASUK AL-AQSA, NEGARA ARAB MENGECEM

Ratusan pemukim Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Minggu (20/9/2026). Mereka melakukan ritual keagamaan di area kompleks dengan pengawasan polisi Israel, bertepatan dengan dimulainya Yom Kippur, hari paling suci dalam kalender Yahudi. Kelompok Hamas dan negara Arab mengecam aksi tersebut.

Gubernur Yerusalem Palestina dikutip Senin (21/9/2026) melaporkan sekitar 570 pemukim telah memasuki pelataran Al-Aqsa hingga Minggu pagi. Mereka disebut melakukan ritual Talmud dan sujud dalam rangka memperingati Yom Kippur.

Sementara itu, laporan lain yang dikutip Arrahmah menyebut jumlah pemukim yang masuk mencapai 796 orang, ditambah sekitar 80 orang yang masuk dengan alasan wisata. Perbedaan angka tersebut berasal dari sumber dan waktu pendataan yang berbeda.

Aksi itu berlangsung di tengah meningkatnya aktivitas pejabat dan pemukim Israel di kawasan Kota Tua Yerusalem menjelang Yom Kippur yang berlangsung sejak Minggu sore hingga Senin (21/9) sore.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir turut memasuki kompleks Al-Aqsa bersama sejumlah pemukim. Menurut laporan yang dikutip media Palestina, mereka menjalankan ritual Talmud di bagian timur kompleks dengan pengawasan ketat pasukan Israel.

Kompleks Al-Aqsa selama ini menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Berdasarkan pengaturan status quo yang berlaku, pengelolaan situs tersebut berada di bawah Wakaf Islam Yerusalem yang ditunjuk Yordania. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kunjungan pejabat Israel dan kelompok pemukim ke kompleks tersebut berulang kali

memicu ketegangan.

Pada Juli 2026, lebih dari 4.200 pemukim dan kelompok sayap kanan Israel dilaporkan memasuki kompleks Al-Aqsa dalam salah satu aksi terbesar tahun ini. Saat itu Ben-Gvir juga masuk ke kompleks tersebut di bawah pengawasan polisi.

Netanyahu Masuk Terowongan

Sehari sebelum aksi pemukim tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama sejumlah menteri dan ribuan pemukim mendatangi kawasan Tembok Al-Buraq atau Tembok Barat di Kota Tua Yerusalem.

Netanyahu dan istrinya, Sara, juga terlihat berada di salah satu terowongan penggalian di bawah kawasan Tembok Barat ketika ritual doa Yahudi berlangsung.

Dalam video yang dibagikan Netanyahu, dia mengatakan berada di terowongan dekat Tembok Al-Buraq.

"Kami berada di terowongan dekat Tembok Al-Buraq. Ini adalah langkah untuk menyentuh batu fondasi keberadaan kita. Kami berada sangat dekat dengan Ruang Mahakudus. Kami ada di sini, dan kami akan selamanya tetap di sini," kata Netanyahu, seperti dikutip Al Jazeera.

Video tersebut memperlihatkan Netanyahu melakukan ritual dari balik kaca antipeluru. Ia kemudian bersama Sara melewati terowongan yang berada di bawah kawasan Tembok Barat.

Al Jazeera melaporkan kunjungan

Netanyahu berlangsung bersamaan dengan gelombang masuknya pemukim Israel ke kompleks Al-Aqsa menjelang Yom Kippur. Media tersebut juga menyebut terowongan dan penggalian di bawah Kota Tua Yerusalem menjadi persoalan sensitif karena lokasinya berada di sekitar kompleks Al-Aqsa.

Hamas Kecam Netanyahu

Kelompok Hamas mengecam kunjungan Netanyahu ke kawasan terowongan dan penggalian di bawah Al-Aqsa serta Tembok Al-Buraq.

Hamas menyebut tindakan tersebut sebagai serangan terhadap identitas dan status Masjid Al-Aqsa. Kelompok itu juga menolak aktivitas penggalian yang dilakukan Israel di

bawah kawasan situs suci tersebut.

"Tindakan Benjamin Netanyahu memasuki terowongan dan area penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa serta Tembok Al-Buraq, disertai pernyataan provokatif dan klaim keliru mengenai Ruang Mahakudus, merupakan serangan terang-terangan terhadap identitas dan status Masjid Al-Aqsa, sekaligus provokasi yang melukai perasaan rakyat Palestina serta bangsa Arab dan umat Islam," demikian pernyataan Hamas.

Hamas menegaskan seluruh kompleks Al-Aqsa, termasuk halaman, ruang salat, tembok, dan gerbangnya, merupakan bagian dari warisan Islam.

Dalam pernyataan lain, Hamas mengatakan Al-Aqsa "akan tetap menjadi masjid Islam secara eksklusif".

Aksi Ben-Gvir dan para pemukim Israel juga memicu reaksi sejumlah negara Arab.

Arab Saudi, Qatar dan Yordania mengecam masuknya Ben-Gvir dan pemukim ke kompleks Al-Aqsa. Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) serta Kementerian Wakaf Palestina juga menyampaikan kecaman.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan provokasi terhadap umat Islam. Riyadh kembali menolak tindakan yang disebutnya sebagai praktik provokatif, hasutan, dan kekerasan oleh pejabat Israel.

Qatar memperingatkan bahwa pelanggaran berulang di kompleks Al-Aqsa dapat memperburuk siklus kekerasan di kawasan. Doha juga menegaskan dukungannya terhadap hak rakyat Palestina dan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Yordania memperingatkan upaya mengubah status quo di Al-Aqsa, termasuk kemungkinan pembagian waktu dan tempat ibadah. Amman juga menegaskan bahwa pengelolaan kompleks tersebut berada di bawah Departemen Wakaf Yerusalem yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf Yordania. (tin rtr cna/dya)



Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunggah video yang memperlihatkan dirinya bersama sang istri, Sara, berjalan menyusuri terowongan di bawah Kota Tua Yerusalem Timur yang diduduki dan kompleks Masjid Al-Aqsa, sebelum mengikuti doa 'Selichot' di Tembok Ratan menjelang hari raya Yahudi, Yom Kippur. (ist)

BATASI 3 MAKANAN INI SAAT KONSUMSI NASI

Nasi menjadi makanan pokok yang sulit dipisahkan dari menu sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain mudah dipadukan dengan berbagai lauk, nasi juga menjadi salah satu sumber utama karbohidrat dan energi.

Namun, bukan berarti semua makanan perlu dikonsumsi dalam porsi besar bersama nasi. Beberapa makanan, terutama yang sama-sama tinggi karbohidrat, perlu diperhatikan porsinya agar asupan kalori tetap seimbang.

Sejumlah artikel gaya hidup menyebut ada tiga kelompok makanan yang sebaiknya dibatasi ketika dikonsumsi bersama nasi, yakni sayuran berpati, salad dengan pelengkap tinggi kalori, dan buah-buahan.

Sayuran Berpati

Kentang, jagung dan kacang polong termasuk sayuran yang mengandung pati lebih tinggi dibandingkan sayuran non-tepung.

Healthline menjelaskan, sayuran berpati umumnya memiliki kandungan karbohidrat lebih tinggi dibandingkan sayuran non-tepung. Kentang dan jagung termasuk contoh sayuran berpati.

Ketika nasi dikonsumsi bersama kentang atau sumber karbohidrat lain dalam jumlah banyak, total karbohidrat dan kalori dalam satu porsi makanan dapat meningkat.

Harvard T.H. Chan School of Public Health juga memasukkan kentang sebagai sumber karbohidrat ketika menyusun pola makan, bukan sebagai pengganti sayuran non-tepung.

Karena itu, nasi tetap bisa dimakan bersama kentang, jagung atau kacang polong. Kuncinya adalah membatasi porsinya, terutama jika dalam satu piring sudah terdapat nasi dalam jumlah cukup banyak.

Salad

Salad juga kerap disebut sebagai makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersama nasi. Padahal, tidak ada aturan umum yang melarang kombinasi keduanya.

Justru, sayuran merupakan bagian penting dalam pola makan seimbang. Harvard Healthy Eating Plate merekomendasikan sekitar setengah piring diisi sayuran dan buah, seperempat dengan sumber sereal, serta seperempat dengan sumber protein sehat. Jadi, nasi dan salad dapat dikonsumsi dalam satu waktu makan.

Yang perlu diperhatikan adalah isi salad dan saus yang digunakan. Salad dengan sayuran segar tentu berbeda dengan salad yang ditambahkan banyak saus tinggi kalori, keju, daging olahan atau bahan pelengkap lainnya. Bagi sebagian orang, sayuran tertentu juga dapat menyebabkan kembung atau gangguan pencernaan. Namun, kondisi tersebut lebih berkaitan dengan sensitivitas individu terhadap makanan tertentu, bukan karena salad tidak boleh dimakan bersama nasi.

Buah

Buah merupakan sumber vitamin, mineral, serat dan berbagai senyawa bioaktif. Karena itu, buah tetap menjadi bagian penting dalam pola makan sehat.

Anggapan bahwa buah harus dipisahkan dari nasi karena nasi sudah dimasak sementara buah dikonsumsi mentah juga tidak memiliki dasar kuat untuk diterapkan kepada semua orang.

Buah utuh justru dapat menjadi pilihan yang baik karena mengandung serat. Harvard merekomendasikan konsumsi buah sebagai bagian dari pola makan seimbang.

Namun, porsinya tetap perlu diperhatikan. Buah utuh berbeda dengan jus buah karena proses pengolahan dapat memengaruhi kandungan serat dan cara tubuh menyerapnya.

Sebagian orang juga bisa mengalami kembung atau gangguan pencernaan setelah mengonsumsi buah tertentu. Hal ini dapat terjadi karena sensitivitas terhadap jenis karbohidrat tertentu, bukan karena buah secara umum tidak boleh dikonsumsi bersama nasi. Jadi, nasi sebenarnya tidak perlu dipisahkan dari kentang, jagung, salad maupun buah.

Hal yang lebih penting adalah mengatur porsi dan menjaga keseimbangan isi piring. Jika nasi sudah menjadi sumber utama karbohidrat, sebaiknya jangan menambahkan terlalu banyak sumber karbohidrat lain seperti kentang dalam satu porsi.

Sebaliknya, tambahkan lebih banyak sayuran non-tepung dan sumber protein agar menu lebih seimbang. Harvard Healthy Eating Plate menyarankan sekitar setengah piring berisi sayuran dan buah, seperempat sumber sereal, dan seperempat sumber protein sehat. (far,ist/dya)

Tips Makan Berimbang dengan Nasi

Atur porsi nasi

jadikan nasi sebagai sumber karbohidrat, bukan bagian terbesar dari seluruh menu.

Perbanyak sayuran

isi sekitar setengah piring dengan sayuran dan buah, sesuai prinsip Healthy Eating Plate dari Harvard.

Tambahkan protein

pilih ikan, telur, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan, atau sumber protein lainnya.

Batasi tumpukan karbohidrat

jika sudah makan nasi, tidak perlu menambahkan banyak mi, kentang, jagung, atau makanan berpati lainnya dalam satu porsi.

Pilih buah utuh

konsumsi buah sebagai bagian dari pola makan harian untuk mendapatkan serat, vitamin, dan mineral.

Bulan Menjauhi Bumi, Sehari Bisa 25 Jam

Bulan ternyata perlahan bergerak menjauhi Bumi. Jarak rata-rata Bumi dan Bulan bertambah sekitar 3,8 sentimeter per tahun akibat interaksi gravitasi keduanya. Fenomena tersebut merupakan proses alamiah yang berlangsung sangat lambat. Dampaknya pun tidak akan dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam waktu dekat.

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN Thomas Djamaluddin menjelaskan, Bumi dan Bulan terus berinteraksi secara gravitasi. Interaksi tersebut memengaruhi rotasi Bumi sekaligus orbit Bulan. Rata-rata jarak Bumi dan Bulan saat ini mencapai sekitar 384.000 kilometer. Menurut Thomas, gravitasi Bumi juga memengaruhi rotasi Bulan melalui gaya pasang surut.

"Gravitasi bumi menyebabkan efek gaya pasang surut pada bulan yang menyebabkan rotasi bulan diperlambat dan akhirnya terkunci pada periode 27,3 hari, sama dengan periode revolusinya," kata Thomas dalam keterangan di kanal YouTube miliknya.

Di sisi lain, gravitasi Bulan menimbulkan gaya pasang surut di Bumi. Gaya tersebut secara perlahan mengerem rotasi Bumi sehingga panjang hari bertambah. "Dalam 200 juta tahun diperkirakan rotasi Bumi diperlambat 1 jam, panjang hari di bumi menjadi 25 jam," ujar Thomas.

Ia menjelaskan, perlambatan rotasi Bumi dan perubahan jarak Bulan merupakan bagian dari proses interaksi gravitasi yang berlangsung sangat panjang. "Interaksi Bumi dan Bulan tersebut yang menyebabkan Bulan menjauhi Bumi walau dampaknya baru terasa setelah ratusan juta tahun," tambahnya.

Mengapa Menjauh?

Dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University Sonni Setiawan menjelaskan, fenomena terkait jarak Bulan dan Bumi juga perlu dipahami dari bentuk orbit Bulan yang elips.

"Efek Bulan menjauhi dari Bumi merupakan konsekuensi orbit revolusi Bulan terhadap Bumi yang berupa elips. Ada saat Bulan berada pada jarak terdekat (perigee) dan jarak terjauh (apogee) dalam setiap periode revolusi Bulan," jelas Sonni, melansir laman resmi IPB.

Dengan orbit berbentuk elips, jarak Bulan terhadap Bumi tidak selalu sama. Dalam setiap periode revolusinya, Bulan mencapai titik terdekat yang disebut perigee dan titik terjauh yang disebut apogee.

Dalam jangka panjang, interaksi gravitasi Bumi dan Bulan membuat jarak rata-rata keduanya terus bertambah. Gravitasi Bulan menarik air laut di Bumi dan menghasilkan pasang surut. Karena Bumi berputar lebih cepat daripada pergerakan Bulan, rotasi Bumi ikut menyeret tonjolan air pasang ke depan.

Proses tersebut secara perlahan mengurangi kecepatan rotasi Bumi. Pada saat yang sama, tarikan air pasang memberikan energi kepada Bulan melalui transfer momentum sudut akibat gaya pasang surut. Transfer energi tersebut membuat Bulan secara perlahan bergerak menjauhi dari Bumi sekitar 3,8 sentimeter setiap tahun.

Tidak Berdampak Langsung bagi Manusia
Sonni mengatakan, Bulan yang perlahan

menjauh dari Bumi merupakan proses alamiah dan tidak perlu dikhawatirkan karena berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang.

Perubahan jarak sekitar 3,8 sentimeter per tahun terlalu kecil untuk menimbulkan perubahan yang dapat dirasakan manusia secara langsung. Bulan memang berperan penting terhadap pasang surut air laut melalui gaya gravitasinya. Pasang surut kemudian memengaruhi berbagai aktivitas di wilayah pesisir, termasuk kegiatan nelayan.

Namun, pasang surut bukan fenomena baru yang muncul karena Bulan sedang menjauh. Pasang surut merupakan proses alamiah yang telah berlangsung akibat interaksi gravitasi Bumi, Bulan, dan Matahari. "Fenomena Bulan menjauh dari Bumi tidak berdampak langsung terhadap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya baru terasa melalui mekanisme lain," tuturnya.

Meskipun terus menjauh, Bulan tidak akan begitu saja lepas dari gravitasi Bumi dalam waktu dekat. Dalam skenario yang sangat jauh di masa depan, rotasi Bumi akan terus melambat hingga akhirnya terkunci secara pasang surut dengan Bulan. (far/ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Skin Booster 'Kulit Mayat' Korea Viral, Ini Fakta Bahan dan Risikonya

Tren perawatan kecantikan asal Korea Selatan kembali menarik perhatian. Kali ini, produk skin booster berbahan Human Acellular Dermal Matrix (hADM) ramai dibicarakan di media sosial karena disebut-sebut sebagai suntikan berbahan "kulit mayat". Istilah tersebut memang terdengar kontroversial. Namun, secara medis, hADM bukanlah kulit manusia utuh yang disuntikkan begitu saja ke wajah.

hADM merupakan matriks jaringan kulit manusia yang telah melalui proses pengolahan untuk menghilangkan sel-sel donor. Yang dipertahankan adalah struktur matriks ekstraseluler, termasuk komponen seperti kolagen dan elastin, yang berfungsi sebagai semacam kerangka jaringan.

Kajian ilmiah mengenai hADM menunjukkan material tersebut memang telah lama digunakan dalam dunia medis, terutama untuk rekonstruksi jaringan dan penanganan luka bakar. Penggunaannya kemudian berkembang ke berbagai bidang bedah rekonstruktif. Namun, penggunaan hADM sebagai skin booster untuk tujuan estetika wajah merupakan perkembangan yang jauh lebih baru.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Indonesia (PERDOSKI) Pusat, Dr dr Hanny Nilasari, SpDVE, Subsp.Ven, FINSVD, FAADV, membenarkan bahwa bahan hADM memang berasal dari jaringan kulit manusia yang didonasikan.

Namun, ia menilai istilah "suntik kulit mayat" tidak sepenuhnya menggambarkan produk tersebut. "Jadi, (terbuat dari) matriks jaringan kulit yang berasal dari donor. Tapi donornya memang donor yang kita enggak tahu apakah itu donor hidup, apakah donor mati," ujar Hanny. "Tetapi, istilah 'suntik kulit mayat' itu sebetulnya

enggak menggambarkan hal yang sesungguhnya gitu," lanjutnya.

Hanny mengatakan, sejauh ini belum ada publikasi ilmiah terbuka yang menjelaskan secara rinci prosedur dan teknik pengambilan jaringan kulit manusia yang digunakan pada produk skin booster tersebut. "Jadi, untuk teknisnya memang kita belum pahami," katanya.

hADM Sudah Lama Digunakan

Meski baru viral sebagai perawatan estetika, acellular dermal matrix bukan teknologi yang benar-benar baru. Dalam dunia bedah rekonstruktif, matriks dermal digunakan antara lain untuk membantu menangani luka bakar dan defek jaringan. Literatur medis menjelaskan bahwa hADM dapat berfungsi sebagai kerangka biologis yang kemudian diintegrasikan dengan jaringan tubuh penerima.

Pada kasus luka bakar berat, misalnya, ketersediaan kulit donor dari tubuh pasien sendiri bisa menjadi terbatas. Dermal matrix kemudian dapat digunakan sebagai bagian dari strategi rekonstruksi.

Tinjauan sistematis terbaru terhadap penggunaan dermal substitute pada luka bakar juga menemukan sejumlah manfaat terhadap kualitas jaringan parut, meski peneliti menekankan masih terdapat variasi hasil penelitian dan kebutuhan untuk memperjelas

indikasi penggunaannya. Salah satu penelitian terbaru memberikan gambaran mengenai mengapa teknologi ini mulai menarik perhatian industri kecantikan. Sebuah uji klinis acak, split-face, tersamar ganda yang dilakukan di Severance Hospital, Seoul, melibatkan 20 orang dewasa berusia 30-65 tahun dengan masalah tekstur kulit pipi.

Penelitian berlangsung selama 20 minggu, dari November 2024 hingga Mei 2025. Satu sisi wajah mendapatkan partikulat hADM, sementara sisi lainnya digunakan sebagai pembanding dengan hyaluronic acid (HA).

Pengawasan Diperketat

Perkembangan produk hADM di Korea Selatan juga menunjukkan bahwa teknologi tersebut bukan sekadar tren media sosial.

Sejumlah perusahaan Korea telah mengembangkan produk berbasis ECM atau hADM. Media Korea melaporkan ekspansi kategori skin booster berbasis jaringan manusia sepanjang 2026, termasuk produk seperti Re20 dan produk sejenis. Namun, perkembangan industri tersebut juga diikuti perhatian regulator. Seoul Economic Daily melaporkan pada Maret 2026 bahwa pemerintah Korea

Selatan sedang meninjau penguatan pengawasan terhadap produk skin booster berbasis jaringan manusia, termasuk pelaporan efek samping dan pembatasan iklan untuk tujuan kosmetik.

Ada di Indonesia?

Di Indonesia, persoalannya menjadi lebih jelas. BPOM memastikan produk skin booster hADM yang viral dari Korea Selatan belum memperoleh persetujuan, belum terdaftar, dan belum beredar secara resmi di Indonesia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi melalui Kedeputan 1 dan Kedeputan 4.

BPOM juga merujuk pada Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Dalam Lampiran V nomor urut 1187, sel, jaringan, atau produk yang berasal dari manusia termasuk bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik.

Dengan demikian, produk berbahan hADM atau turunan jaringan manusia tidak dapat diperlakukan begitu saja sebagai kosmetik biasa. (far,ist/dya)



Paradoks Beras didari Hal 1

Di antara angka stok yang besar, rak toko yang kosong, dan harga yang masih naik di berbagai daerah, ada persoalan distribusi serta komposisi stok yang tidak sederhana.

Pantauan sejak Sabtu (19/9/2026), menunjukkan beras premium tidak tersedia di Alfamidi Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Yang tersisa hanya satu kemasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ukuran 5 kilogram.

Kondisi serupa terlihat di Indomaret Jalan Raya Jombang. Beras yang tersedia didominasi produk SPHP Bulog. Untuk kategori premium, hanya terdapat beras Punokawan milik Bulog kemasan 10 kilogram.

Kondisi itu terjadi ketika gudang Bulog sebenarnya menyimpan cadangan dalam jumlah besar.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 4,722 juta ton per 14 September 2026.

Pernyataan itu disampaikan Rizal di Jakarta pada Senin (21/9/2026), saat menerima kunjungan kerja Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini dan jajaran di Pusat Komando dan Pengendalian Bulog. Menurut Rizal, stok tersebut turun dari sekitar 5,4 juta ton karena telah banyak disalurkan melalui berbagai program pangan pemerintah.

"Total stoknya beras Bulog sekarang yang ada di gudang sudah turun, yang kemarin 5,4 juta ton, sekarang tinggal 4,722 juta ton. Kenapa angkanya jadi turun? Karena sudah banyak yang didistribusikan," kata Rizal saat itu.

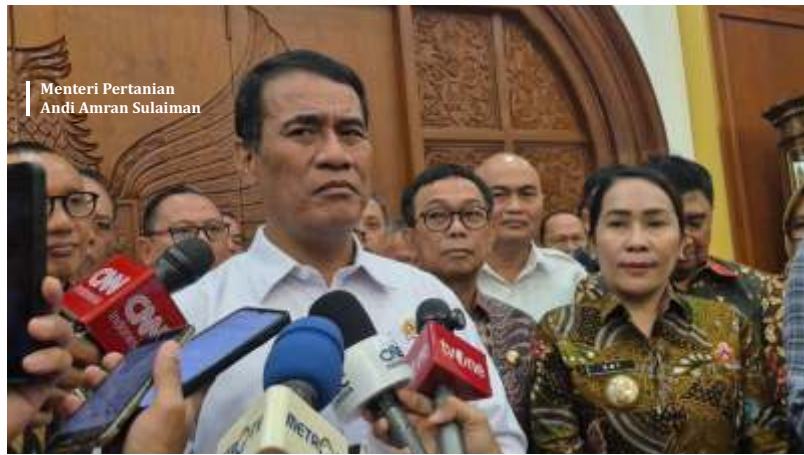
Bulog, kata Rizal, telah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat pada tahap pertama pada Februari dan Maret 2026. Kebutuhannya sekitar 600 ribu ton.

Untuk tahap kedua periode Juli, Agustus, dan September, penyalurannya mencapai hampir 1 juta ton. Bulog juga mencatat penyaluran SPHP sejak awal tahun hingga September sekitar 800 ribu ton.

Namun, 4,722 juta ton bukan berarti seluruhnya merupakan beras komersial yang siap memenuhi permintaan ritel modern.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyebut berdasarkan data per 14 September 2026, stok beras komersial Bulog hanya sekitar 160 ribu ton dari total stok 4,72 juta ton.

Menurut Khudori, Bulog setiap bulan menggelontorkan sekitar 75 ribu ton beras premium dan 35 ribu



ton beras medium untuk pasar komersial.

Dengan demikian, angka stok 4,7 juta ton perlu dibaca secara hati-hati. Sebagian besar merupakan cadangan pemerintah yang digunakan untuk berbagai program pangan, sementara volume komersial yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan pasar jauh lebih kecil.

Harga Naik di 135 Daerah

Persoalan tersebut juga terlihat dari pergerakan harga di daerah. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsu Tohir mengatakan masih terdapat 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras.

Pernyataan itu disampaikan Tomsu dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Pusat Kemendagri, Senin (21/9/2026). Ia meminta Bulog mengevaluasi daerah-daerah yang harga berasnya masih tinggi meski berbagai intervensi stabilisasi sudah dilakukan.

"Upaya-upayanya sudah oke nih, sudah bagus, saya sangat menghargai, tapi kan kita tidak bisa dengan upaya yang sudah baik ini tapi hasilnya belum baik. Nah ini harus dicari penyebabnya," kata Tomsu.

Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Maybrat disebut sebagai contoh daerah yang masih mencatat harga beras tinggi.

Data yang dipaparkan BPS dalam rakor tersebut juga menunjukkan inflasi Agustus 2026 secara bulanan sebesar 0,21 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 0,57 persen, dengan andil 0,17 persen. Beras menjadi salah satu komoditas yang ikut menyumbang inflasi, bersama daging ayam ras, cabai rawit, dan ikan segar.

Tomsu meminta program stabilisasi tidak berhenti pada pelaksanaan penyaluran. Pemerintah daerah penerima bantuan diminta dilibatkan dalam evaluasi bersama Kementerian Pertanian untuk melihat apakah bantuan benar-benar berdampak pada harga di lapangan.

Persoalan tersebut kemudian

mendorong pemerintah meminta Bulog memperkuat pasokan premium keritel modern.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman meminta Bulog mengoptimalkan stok beras premium yang tersedia untuk jaringan ritel.

"Tidak boleh tidak ada kata lain kecuali memenuhi kebutuhan masyarakat. Beras premium kami minta Bulog optimalkan suplai ke toko-toko ritel modern," kata Amran.

Bapanas mencatat stok CBP yang dikelola Bulog per 18 September 2026 sekitar 4,6 juta ton. Penyaluran sepanjang tahun berjalan hingga pertengahan September mencapai sekitar 2,3 juta ton.

Amran kemudian meminta pasokan beras premium ke ritel diperbesar. Pemerintah menargetkan tambahan pasokan hingga 300 ribu ton.

"Kalau 200-300 ribu (ton), berasnya banyak," kata Amran pada Senin, 21 September 2026.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada hari yang sama juga mengatakan Bulog terus memperkuat ketersediaan beras premium melalui jaringan ritel modern. Penyaluran diarahkan agar masyarakat di kota besar dan wilayah perkotaan lebih mudah mendapatkan beras premium.

Masalahnya, pasokan yang sudah digelontorkan belum otomatis membuat semua rak terisi. Pemerintah sebelumnya menyebut sekitar 110 ribu ton beras premium telah disalurkan ke ritel modern. Namun, pantauan pada 19 September masih menemukan kekosongan di sejumlah toko.

Kekosongan beras premium juga berlangsung setelah pemerintah menertibkan beras fortifikasi.

Pemerintah sebelumnya memeriksa sejumlah merek beras fortifikasi. Hasil pemeriksaan menyatakan 25 merek tidak memenuhi persyaratan kandungan dan mutu sesuai standar yang berlaku. Produk-produk tersebut dipasarkan dengan klaim tambahan vitamin dan mineral.

RINCIAN PERJALANAN STOK BERAS BULOG 2026

- **Januari - Februari (Awal Tahun):**
Stok dibuka pada level 3,25 hingga 3,30 juta ton. Stok ini merupakan gabungan sisa cadangan akhir tahun 2025 dan pemenuhan awal target pengadaan komoditas lokal.
- **Maret - Mei (Periode Puncak Swasembada):**
Mengalami lompatan ekspansional dari 4,22 juta ton (Maret) hingga memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pangan nasional di angka 5,30 juta ton pada akhir Mei. Hal ini didorong penuh oleh keberhasilan program penyerapan gabah lokal berskala masif.
- **Juni - Agustus (Stabilisasi Musim):**
Pasokan bertahan kuat di kisaran 5,18 hingga 5,25 juta ton. Pemerintah menahan keran impor beras secara ketat karena ketersediaan lumbung dalam negeri dinilai sudah melimpah ruah.
- **September (Posisi Terkini):**
Cadangan berada di posisi 4,72 juta ton. Penurunan sekitar 500 ribu ton dari bulan sebelumnya terjadi karena Bulog menyalurkan intervensi pangan komersial (SPHP) dan bantuan beras 10 kg secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas daya beli pasar.



Pemerintah kemudian meminta penghentian produksi produk yang dinyatakan bermasalah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dugaan persoalan fortifikasi ikut memengaruhi dinamika pasar beras. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 21 September 2026, ia mengatakan produksi beras fortifikasi yang bermasalah sudah dihentikan.

"Udah, Insya Allah turun. Karena fortifikasi tidak main lagi kan?" ujar Amran.

Berdasarkan operasi Bapanas, ada beras fortifikasi yang dijual hingga Rp57.000 per kilogram, sementara harga yang disebut semestinya sekitar Rp13.500 per kilogram.

Kondisi itu ikut menjadi alasan pemerintah menaruh perhatian pada peredaran beras premium dan fortifikasi. Persoalan beras tidak berhenti pada pasokan. Kekosongan di rak juga dapat mengubah cara konsumen mengambil keputusan.

Guru Besar Perilaku Konsumen IPB University, Prof Megawati Simanjuntak, mengatakan, ketika konsumen mendengar beras kemasan 5 kilogram mulai sulit ditemukan, muncul kekhawatiran barang akan semakin langka. (wid,kum,ant,ist,mer/dya)

KPK OTT BUPATI BOLMUT, DIDUGA TERKAIT SUAP PROYEK JALAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, lembaga antirasuah menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, Sirajudin Lasena. Penangkapan itu dilakukan pada Senin, (21/9/2026). Sirajudin diamankan tim KPK di Jakarta bersama empat orang lainnya.

Ketua KPK Setyo Budiyo membenarkan adanya operasi tersebut. "Benar, sedang ada kegiatan di lapangan," kata Setyo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kemudian menjelaskan jumlah pihak yang diamankan. Total ada 14 orang yang terjaring dalam operasi tersebut.

"Dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah total 14 orang" kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dari jumlah tersebut, lima orang diamankan di Jakarta, termasuk Sirajudin. Delapan orang lainnya ditangkap di sejumlah lokasi di Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Satu orang lainnya diamankan di Gorontalo.

"Lima orang diamankan di Jakarta. Salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara, salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Utara," ujar Budi.

"Kemudian delapan orang diamankan di wilayah Sulawesi Utara, di antaranya di Kabupaten Bolmut itu sendiri, dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Gorontalo," lanjutnya.

Mereka yang diamankan berasal dari sejumlah unsur. Selain kepala daerah, KPK menangkap kepala dinas, aparat sipil negara (ASN), dan pihak swasta.

"Untuk pihak-pihak yang diamankan ada Bupati, Kepala Dinas, kemudian ASN lain, dan juga pihak-pihak swasta," kata Budi.

KPK kemudian mengungkap dugaan perkara yang menjadi latar belakang OTT. Penindakan tersebut berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terutama proyek infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).

"Untuk proyeknya, di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUTR," kata Budi.

KPK menduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan dengan proyek-proyek tersebut.

Namun, KPK belum merinci proyek mana saja yang masuk dalam penyelidikan maupun bagaimana

konstruksi dugaan pemberian uang tersebut.

"Nanti kami update kembali, update secara lengkap apa saja proyek-proyek yang terkait dengan perkara ini karena dijadwalkan malam ini akan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan," ucap Budi.

Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah.

"Dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah," kata Budi.

Uang itu ditemukan di tiga wilayah yang menjadi lokasi operasi, yakni Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

"Sebagian diamankan di Jakarta beserta pihak-pihak yang diamankan juga. Kemudian sejumlah uang lain diamankan di wilayah Sulawesi Utara ataupun di Gorontalo," jelas Budi.

KPK belum mengungkap nominal persis uang yang disita. Angka detail barang bukti tersebut akan disampaikan setelah proses pemeriksaan dan ekspose perkara

OTT ke-21 KPK di 2026

Penangkapan Sirajudin menjadi OTT ke-21 yang dilakukan KPK sepanjang 2026, berdasarkan catatan ANTARA hingga Senin, 21 September 2026. Operasi ini memperpanjang rangkaian penindakan KPK terhadap pejabat pemerintahan daerah maupun pusat sepanjang tahun berjalan.

OTT pertama pada 2026 dilakukan pada Januari terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Setelah itu, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maldi dan Bupati Pati Sudewo dalam OTT berbeda pada bulan yang sama.

Pada Februari, KPK melakukan OTT terhadap Kepala KPP Madya Banjarmasin, mantan pejabat Ditjen Bea dan Cukai Rizal, serta jajaran Pengadilan Negeri Depok.

Memasuki Maret, tiga kepala daerah turut terjaring dalam operasi berbeda: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

OTT berlanjut pada April terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu

Wibowo. Tidak ada OTT KPK yang dicatat pada Mei.

Pada Juni, KPK kembali melakukan sejumlah operasi. Penindakan antara lain terkait Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Silmy Karim, Bupati Muara Enim Edison, ASN Badan Pemeriksa Keuangan, serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.

Juli menjadi salah satu bulan dengan rangkaian OTT terbanyak. KPK melakukan operasi ke-15 hingga ke-18, yang antara lain menjerat Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantor.

Pada Agustus, KPK melakukan OTT terhadap jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Sementara pada September, sebelum OTT terhadap Sirajudin, KPK telah melakukan OTT ke-20 terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

KPK belum menetapkan status hukum 14 orang yang diamankan dalam OTT Bolmut tersebut. Mereka masih berstatus terperiiksa.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

KPK selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan ekspose perkara untuk menentukan apakah terdapat bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan serta menetapkan tersangka.

Sampai Senin

malam, KPK belum mengumumkan pasal yang disangkakan ataupun pihak yang diduga bermasalah, serta aliran uang dijadwalkan disampaikan KPK setelah proses ekspose.

Penjelasan lebih lengkap mengenai konstruksi perkara, proyek yang diduga bermasalah, serta aliran uang dijadwalkan disampaikan KPK setelah proses ekspose.

Operasi tersebut juga menjadi perhatian karena menyentuh proyek infrastruktur daerah. KPK sejauh ini baru menyebut pembangunan jalan di Dinas PUTR sebagai salah satu proyek yang berkaitan dengan perkara, sehingga rincian nilai proyek dan mekanisme dugaan pemberian uang masih menunggu penjelasan resmi lembaga antirasuah. (tin,ist,kum/dya)

OTT KPK KEPALA DAERAH PADA TAHUN 2026



Maldi (Wali Kota Madiun)
19 Jan: dugaan korupsi proyek & CSR.



Sudewo (Bupati Pati)
19 Jan: dugaan pemerasan jabatan perangkat desa.



Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan)
3 Mar: dugaan korupsi outsourcing.



Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong)
9 Mar: dugaan suap proyek.



Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap)
13 Mar: dugaan pemerasan.



Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung)
10 Apr: dugaan korupsi daerah.



Edison (Bupati Muara Enim)
8 Jun: dugaan suap/pemerasan infrastruktur.



Suhardiman Amby (Bupati Kuantan Singingi)
30 Jun: dugaan suap perizinan & proyek.



Syah Afandin (Bupati Langkat)
2 Jul: dugaan suap proyek.



Etik Suryani (Bupati Sukoharjo)
9 Jul: dugaan pemerasan.



Lalu Ahmad Zaini (Bupati Lombok Barat)
20 Jul: dugaan suap pengadaan.



Anom Widiyantor (Bupati Pemalang)
28 Jul: dugaan suap proyek & gratifikasi.

